

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kompleks membuat semua aspek kehidupan berkembang dengan sangat cepat, termasuk bidang ekonomi dan pembangunan. Hal ini tentu menuntut terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau, begitu pula pada sektor transportasi darat. Transportasi adalah segala bentuk perpindahan orang dan barang menggunakan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor. Terdapat dua unsur utama yang harus tersedia agar terselenggaranya transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau yaitu, sarana berupa kendaraan serta prasarana yang meliputi tersedianya jalan, jembatan, maupun marka lalu lintas.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, juga menyebabkan mobilitas penduduk semakin tinggi, hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirlantas Polri, pada triwulan pertama tahun 2016 telah terjadi 25.309 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 5.328 jiwa. Senada dengan itu, data yang bersumber dari badan kesehatan dunia (WHO) tahun 2015, Indonesia merupakan negara dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi dikawasan Asia Tenggara dengan jumlah korban meninggal dunia 38.279 jiwa. Berdasarkan data diatas, sangat jelas menggambarkan bahwa tingkat keselamatan penyelenggaraan transportasi darat masih sangat rendah, oleh sebab itu diperlukan kesadaran semua pihak untuk selalu menjamin semua unsur transportasi darat berada dalam kondisi optimal dan aman, diantaranya kondisi fisik kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 telah mengamanatkan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis kendaraan meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, serta penempelan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan laik jalan adalah emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sitem

rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, serta kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Untuk mencapai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka dilakukanlah pengujian kendaraan bermotor. Hal ini senada dengan apa yang telah tersurat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomer 22 tahun 2009 yang berbunyi, bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, tujuan dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor khususnya uji berkala adalah, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kemudian melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, serta memberikan pelayanan umum berupa jasa pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan pengujian kendaraan yang bermotor yang profesional dan akuntabel serta hasil uji yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta bagian yang tidak kalah pentingnya yaitu sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 122 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor. Sedangkan untuk memperoleh sertifikat kompetensi, penguji harus memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat serta dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi.

Dalam rangka pemenuhan terhadap tenaga ahli dan kompeten dibidang pengujian kendaraan bermotor, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan telah mendidik dan melatih calon-calon penguji kendaraan bermotor melalui program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor. Salah satu program

didalam pendidikan dan pelatihan taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP). Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen adalah salah satu tempat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2020.

## I.2. Tujuan

1. Menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh pada saat perkuliahan di Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen,
2. Belajar beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia kerja,
3. Meningkatkan wawasan dan membentuk kepribadian Taruna dan Taruni sebagai kader pembangunan dengan wawasan berfikir yang luas,
4. Meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang mekanisme pengujian kendaraan bermotor, dan
5. Menghimpun data-data yang diperlukan guna penyusunan Laporan Praktek Kerja Profesi di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen.

## I.3. Manfaat

Kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya pihak yang terkait di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain:

1. Manfaat bagi pelaksana PKP yaitu :
  - a. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang efektif dengan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,
  - b. Melatih pola pikir yang obyektif dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor, dan
  - c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
2. Manfaat bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen yaitu :

- a. Mendapatkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dalam perbaikan
  - b. Membantu proses peningkatan dan pengembangan kinerja pelayanan dari Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Manfaat bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yaitu :
- a. Sebagai salah satu tolak ukur guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik,
  - b. Sebagai salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum dan silabus program studi Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor, dan
  - c. Sebagai bahan analisis dan kajian dalam bidang pengujian kendaraan bermotor guna peningkatan kinerja dan pelayanan yang efektif, efisien dan akurat serta akuntabel.

#### I.4. Ruang Lingkup

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi ini di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen dimana kegiatan ini difokuskan pada peran aktif Taruna secara langsung pada aktifitas Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini tidak hanya mengamati aktifitas pengujian secara pasif melainkan juga ikut serta secara aktif dalam kegiatan yang berlangsung pada pengujian baik kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis.

#### I.5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKP

##### 1. Waktu Pelaksanaan PKP

Praktek kerja Profesi II dilaksanakan di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan PKP disesuaikan dengan kalender akademik Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

**Tabel I.1** Waktu pelaksanaan PKP

Kegiatan	Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Pelepasan PKP 14 Februari 2020								
Pelaksanaan PKP 17 Februari – 19 Maret 2020								
Kunjungan Dosen I								
Kunjungan Dosen II								
Kembali ke PKTJ								

## 2. Tempat Pelaksanaan PKP

Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen. Dalam sebuah praktek kerja profesi untuk kelancaran dalam menyelesaikan suatu laporan harus terdapat rencana kegiatan yang telah disusun. Secara geografis, Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' hingga 7°50' Lintang Selatan dan 109° 22' hingga 109°50' Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedangkan pada bagian utara berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Sementara itu di barat wilayah Gombong, terdapat Kawasan Karst Gombong Selatan sebuah rangkaian pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan berarah utara-selatan. Daerah ini memiliki lebih dari seratus gua berstalaktit dan stalagmit. Sementara itu panjang pantai sekitar 53 km yang sebagian terbesar merupakan pantai dengan fenomena gumuk pasir. Sungai terbesar di Kabupaten Kebumen adalah Sungai Luk Ulo, Sungai Jatinegara, Sungai Karanganyar, Sungai Kretek, Sungai Kedungbener, Sungai Kemit, Sungai Gombong, Sungai Ijo, Sungai Kejawang, dan Kali Medono. Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111, 50 ha atau 1.581, 11 km<sup>2</sup> dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah. Dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 49.768, 00 hektare atau sekitar 31, 04% sebagai lahan sawah dan 108, 343.50 hektare atau 68.96% sebagai lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah beririgasi teknis

dan hampir seluruhnya (46, 18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37, 82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11, 25% lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 40.985, 00 hektare (37, 73%), tegalan/kebun seluas 33.777, 00 hektare (33, 57%) serta hutan negara seluas 22.861, 00 hektare (21, 08%) dan sisanya digunakan untuk padang penggembalaan, tambak, kolam, tanaman kayu-kayuan, serta lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah lainnya. Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa, dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 buah dan 7.027 buah Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kebumen. Di samping Kecamatan Kebumen, kota-kota kecamatan lainnya yang cukup signifikan adalah Gombang, Karanganyar, Kutowinangun, Ayah, Petanahan serta Prembun.



**Gambar I.1** Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen*

#### I.6. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan Laporan Praktek Kerja Profesi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Seksi Pengujian Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Latar Belakang, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Waktu dan Pelaksanaan PKP dan Sistematika Penulisan Laporan dari pelaksanaan PKP ini.

**BAB II : Gambaran Umum**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Sejarah dan Perkembangan Lokasi PKP, Profil Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen, Kelembagaan dan Metode Kegiatan dari kegiatan PKP ini.

**BAB III : Sistem Layanan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Administrasi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Operasional Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Mekanisme Pengawasan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

**BAB IV : Hasil Pelaksanaan PKP**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Pengujian, Penerapan Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Penerapan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penerapan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Penerapan SMK3/HSE pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Pada Bab ini penyusun menguraikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari hasil analisa dan pengolahan data maupun hasil penilaian kinerja serta pembahasan pada masing – masing Bab diatas terkait dengan kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen.

Daftar Pustaka

Lampiran